

# IMPLEMENTASI KERJASAMA KONTRA-TERRORISME INDONESIA-AUSTRALIA (STUDI KASUS: BOM BALI I TAHUN 2002)

## IMPLEMENTATION OF COUNTER-TERRORISM COOPERATION BETWEEN INDONESIA-AUSTRALIA (CASE STUDY: FIRST BALI BOMBINGS in 2002)

Ari Ulandari<sup>1</sup>, Yoedhi Swastanto<sup>2</sup>, Effendi Sihole<sup>3</sup>  
([ariulandari.laj@gmail.com](mailto:ariulandari.laj@gmail.com))

**Abstrak** – Kejahatan terorisme yang bersifat lintas negara membutuhkan kerjasama internasional untuk menanganinya. Awalnya Indonesia enggan untuk terlalu terlibat dalam isu tersebut. Sebaliknya, Australia memang sudah sejak awal mendukung kampanye perang global melawan terorisme. Kendati demikian, Bom Bali telah merubah arah kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Indonesia dan Australia memutuskan bekerjasama dalam menangani kasus tersebut. Permasalahannya adalah serangan teror di Indonesia, terutama yang menjadikan Australia sebagai target, terus terjadi setelah serangan Bom Bali. Oleh karena itu diperlukan analisa latar belakang terjadinya kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia dan proses implementasi kerjasama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya jumlah korban warga Australia menjadi pertimbangan strategis dilakukannya kerjasama dari pihak Australia, sedangkan dari pihak Indonesia karena kepentingan Indonesia untuk sesegera mungkin meredam efek negatif, baik domestik maupun internasional, Bom Bali terhadap posisi Indonesia. Implementasi kerjasama tersebut terkategori berhasil dinilai dari jumlah pelaku yang tertangkap dan terkategori belum berhasil dinilai dari jumlah serangan yang dapat diredam.

**Kata Kunci:** Bom Bali, Indonesia dan Australia, Implementasi, Kerjasama Internasional, Kontra Terorisme

**Abstract** - Terrorism as a trans-national crime is to be adhered with international cooperation to stabilise rule based order. Historically, Indonesia has positioned terrorism as a low national security agenda. In the contrary, Australia acted by supporting its allies in the global war on terror campaign. The Bali Bombings 2002 catalysed Indonesia's national security policy and had Australia's support to cooperate in the statecraft of Indonesia's stability. The two countries are trying to build mutual cooperation to tackle terrorism. This thesis analyse the formation of counter-terrorism cooperation and the implementation process. This research uses qualitative-case studies revealing that a high percentage of Australian victims pushed Australia to cooperate with Indonesia, whereas Indonesia had self-interest to omit the negative impact of the Bali Bombings to assert their national interest internationally and domestically. The implemetation was success based on the number of perpetrators can be arrested and hadn't been so success based on number of attacks can be decreased.

**Keywords:** Bali Bombings, Counter-Terrorism, Indonesia and Australia, international cooperation, Implementation

---

<sup>1</sup> Program studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Program studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Program studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

## Pendahuluan

Sebelum insiden runtuhnya menara kembar WTC di Amerika Serikat pada tanggal 9 September 2001 atau yang lebih sering disebut 9/11 (*nine eleven*), istilah terorisme belum banyak dibicarakan. Dalam kerjasama internasionalpun, isu kejahatan seperti ini masih digabungkan dalam isu *trans-national crime*<sup>4</sup>.

Amerika Serikat (AS) melancarkan kampanye perang global melawan terorisme atau yang dalam bahasa aslinya disebut *Global War on Terrorism* (GWOT). Kampanye ini dihembuskan oleh AS ke seluruh dunia, termasuk ke kawasan Asia Tenggara. Presiden Bush sendiri bahkan telah menggambarkan Asia Tenggara sebagai medan tempur kedua perang melawan teror<sup>5</sup>.

Dari sudut pandang kaum jihadis (atau dalam istilah AS disebut sebagai kelompok ekstrimis bahkan teroris), Asia Tenggara juga dianggap sebagai medan juang kedua. Bahkan sebelum kejadian 9/11, Asia Tenggara sudah menjadi 'hub' bagi berbagai aktivitas terorisme global.

berkembangnya kelompok-kelompok ini diklaim sebagai akibat lemahnya pemerintahan Indonesia dalam merespon isu terorisme, masyarakat Indonesia yang rentan, serta perbatasan yang terlampau mudah dilintasi<sup>6</sup>.

Serangan Bom Bali diduga merupakan respon para pelaku terhadap rekaman suara dari pimpinan Al-Qaeda, Usama Bin Laden, dan deputi seniornya, Ayman al-Zawahiri, yang disebar oleh Al-Jazeera awal-awal pada tanggal 6 Oktober 2002 yang mengajak menyerang kembali kepentingan AS dan barat<sup>7</sup>. Kerumitan serangan dan untuk pertama kalinya digunakan pelaku bom bunuh diri di Indonesia menunjukkan peningkatan aktivitas terorisme di Asia Tenggara<sup>8</sup>. Komandan investigasi *Australian Federal Police* (AFP) mengatakan bahwa serangan Bom Bali merupakan hasil sebuah perencanaan yang sangat baik untuk memaksimalkan korban<sup>9</sup>.

Sebelum kejadian Bom Bali I, Australia dan Indonesia memiliki kecenderungan respon yang sangat bertolak belakang terhadap isu

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara peneliti.

<sup>5</sup> Arabinda Acharya, "The Bali Bombings: Impact on Indonesia and Southeast Asia". *Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper Series II (Islamism in Southeast Asia)*, No. 2. by Hudson Institute, tanpa tahun.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Federal Bureau of Investigation, *Terrorism 2002-2005*, (Washington, 2005), hlm. 11.

<sup>8</sup> David Craig. *Defeating Terror: Behind the Hunt for the Bali Bombers*, (Richmond: Hardie Grants Books: 2017), hlm. 1083 (on kindle view).

<sup>9</sup> BBC News. "Bali Bombings", 15 Oktober 2002

terorisme. Perbedaan ini menjadi menarik untuk didalami untuk memahami bagaimana kerjasama kontra-terorisme antara Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus Bom Bali I bisa diimplementasikan. Kerjasama penanganan kasus Bom Bali diakui sebagai contoh keberhasilan kerjasama internasional dalam bidang kontra-terorisme. Hal ini tentunya mengundang keingintahuan bagaimana prosesnya sehingga dapat diambil pelajaran ke depannya dalam merancang strategi kerjasama internasional dalam bidang kontra-terorisme. Walaupun faktanya setelah serangan Bom Bali 2002 masih ada sejumlah serangan teror di Indonesia, khususnya yang menjadikan Australia dan kepentingannya sebagai target. Jadi perlu dicarikan penjelasan atas semua dinamika implementasi kerjasama tersebut.

Selain itu, Bom Bali juga telah merubah arah kebijakan kontra-terorisme Indonesia dari sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih agresif. Bom Bali yang menelan banyak korban warga asing telah mengundang perhatian dunia. Penanganan kasus tersebut melibatkan sejumlah negara, khususnya Australia. Bom Bali adalah contoh kasus yang sangat cocok untuk dijadikan bahan

kajian implementasi kerjasama kontra-terorisme internasional. Selain itu topik hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yang sangat dinamis juga menjadi sebuah bahan penelitian yang tidak kalah menariknya. Demikian penelitian “Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus: Bom Bali Tahun 2002)” merupakan kombinasi sejumlah titik-titik menarik yang sangat layak untuk dikaji lebih mendalam.

Kerjasama kontra-terorisme antara Indonesia dan Australia semakin diperkuat setelah terjadinya serangan Bom Bali I. Bom Bali jelas-jelas telah menjadi *trigger* pelaksanaan sejumlah MoU yang telah disepakati oleh 2 negara sebelum terjadinya insiden Bom Bali. Tentunya kesepakatan tersebut harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang disebut dengan implementasi. Dalam kajian implementasi, ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan untuk mempelajari bagaimana sebuah kebijakan ataupun keputusan dilaksanakan. Bila kebijakan tersebut sukses, tentunya akan menghasilkan kondisi yang diharapkan, dalam hal ini tercapainya pengendalian teror Bom Bali khususnya dan terorisme pada umumnya. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut gagal

maka diperlukan kajian ulang agar dapat dirumuskan formulasi kerjasama yang lebih efektif. Proses ini merupakan proses iteratif hingga tujuan dari sebuah kerjasama ataupun kebijakan tercapai.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dan kajian literatur serta dokumen, termasuk juga berbagai macam rekaman gambar maupun suara yang relevan dengan Bom Bali. Wawancara dilakukan di sejumlah tempat di Jawa terhadap beberapa informan sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemkopolkam), Deputi II Bidang Kerjasama Luar Negeri.
- b. Kejaksaan Agung RI
- c. Densus 88 AT
- d. Konsultan POLRI dalam penanganan kasus Bom Bali.
- e. Salah satu kepala investigasi awal Bom Bali.
- f. Anggota tim pelacak dan perburuan pelaku Bom Bali.

- g. Wakil Indonesia dalam penandatanganan *MoU Combating International Terrorism* antara Indonesia dan Australia pada bulan Februari 2002.

Adapun model analisis data yang akan digunakan adalah *pattern matching*. Tahapan analisis menggunakan teori kerjasama dan konsep analisis implementasi kebijakan Mazmanian-Sabatier yang berfokus pada karakteristik masalah, struktur implementasi kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Analisis Latar Belakang Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia dan Australia dalam Kasus Bom Bali I**

Insiden 9/11 melatarbelakangi ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai kerjasama pemberantasan terorisme internasional (*Memorandum of Understanding on Combating International Terrorism*) pada bulan Februari 2002 antara Indonesia dan Australia<sup>10</sup>. Setelah itu, pada tanggal 13 Juni 2002 di Perth, Indonesia dan

---

<sup>10</sup> Australian Federal Police, *Submission No 62: Inquiry into Australia's Relations with Indonesia*, (Canberra: 2003), hlm. 6

Australia menandatangani MoU *between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combatting Transnational Crime and Developing Police Cooperation*. MoU ini diratifikasi pada tanggal 21 September 2002 oleh masing-masing negara. MoU ini dikembangkan berdasarkan *Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and the Australian Federal Police regarding Cooperation in Law Enforcement* pada tanggal 5 Agustus 1997. MoU ini merupakan kerangka kerja dalam hal pertukaran intelijen, operasi gabungan, dan pengembangan kemampuan. Kerjasama ini juga meliputi pelatihan analisa intelijen dan pertukaran informasi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak mengenai pemahaman akan gerakan terorisme di Indonesia<sup>11</sup>. Selain itu juga disepakati untuk diadakan pertemuan rutin tahunan untuk mengevaluasi jalannya kerjasama ini. Ada 8 tipe tindakan kriminal yang tercantum dalam MoU tersebut, yakni terorisme, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata api, bajak laut, pencucian uang, penyeludupan dan

perdagangan manusia, kejahatan siber lintas negara, dan kejahatan ekonomi<sup>12</sup>.

Uraian di atas merupakan pijakan atau payung hukum penyelenggaraan kerjasama kontra-terorisme dalam kasus Bom Bali I. Selain itu, peneliti juga akan menyampaikan hasil analisa latar belakang terjadinya kerjasama tersebut di luar aspek legal di atas. Setidaknya ada 15 pertimbangan strategis yang berhasil peneliti temukan mengenai latar belakang Indonesia bekerjasama dengan Australia dalam penanganan Bom Bali.

Sebelum menyebutkan satu per satu alasan tersebut, peneliti ingin menyampaikan terlebih dahulu satu semboyan lama mengenai hubungan internasional. Semboyan tersebut disebutkan kembali oleh salah satu informan dalam percakapan via telepon dengan peneliti. Satu semboyan tua yang menurut peneliti tidak akan usang oleh waktu, yakni 'tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang abadi itu hanyalah kepentingan'. Maka dari itu sebanyak apapun alasan atau latar belakang yang kita cari dari sebuah kerjasama, apalagi kerjasama internasional, pastinya muara dari semua

---

<sup>11</sup> David Connery *et.al.*, "Partners Against Crime: A Short history of the AFP-POLRI

Relationship", jurnal Australian Strategic Police Institute, Maret 2014.

<sup>12</sup> Australian Federal Police, *op.cit*, hlm. 8

itu adalah kepentingan. Jika ditanya mengapa Indonesia dan Australia dalam hal kontra-terorisme tetap perlu bekerjasama secara bilateral padahal sudah ada kerjasama multilateral, jawabannya adalah karena Kerjasama bilateral merupakan langkah terdekat yang paling mudah untuk diambil dalam melakukan kerjasama internasional<sup>13</sup>. Selain itu Kerjasama dalam bidang kontra-terorisme adalah bidang kerjasama yang paling sedikit hambatannya karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama<sup>14</sup>.

Dalam pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam kasus Bom Bali bersifat resiprokal. Pihak Australia memberikan *best practices* sehingga kemampuan POLRI meningkat. Dan Indonesia menyelesaikan kasus yang menyebabkan banyak warga Australia menjadi korban<sup>15</sup>.

- a. Korban jiwa paling banyak berasal dari Australia.

Hal ini menjadi tekanan besar bagi pemerintah Australia. Australia memiliki kepentingan untuk melindungi warga negaranya<sup>16</sup>. Tuntasnya pengungkapan kasus Bom

Bali I juga menguntungkan bagi Australia<sup>17</sup>. Sehingga adanya kerjasama dalam hal ini sangatlah wajar<sup>18</sup>.

Jatuhnya banyak korban dari pihak Australia yang sesungguhnya merupakan alasan utama bagi Australia untuk bekerjasama secara intensif dalam penanganan kasus Bom Bali. Sehingga ada atau tidak ada MoU sebelumnya Indonesia akan bekerjasama dengan Australia<sup>19</sup>. Anggota Densus 88 AT juga menjelaskan bahwa tidak selalu sebuah kerjasama harus didahului oleh adanya MoU<sup>20</sup>.

Menurut keterangan wakil Indonesia dalam penandatanganan MoU terkait, MoU tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum dan juga tidak perlu diratifikasi. Pada saat penandatanganan MoU Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia pada bulan Februari 2002, Menlu Hassan Wirayudha hanya menugaskan beliau untuk menandatangani dokumen MoU. Adapun mengenai persiapan naskah tidak melibatkan beliau. Dengan kata

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>14</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>15</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>16</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>17</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>18</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>19</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>20</sup> Hasil wawancara peneliti

lain semuanya hanyalah tentang perkembangan politik global di tahun 2001-2002<sup>21</sup>.

Kendatipun demikian dalam tataran konsep tentunya sebuah kesepakatan resmi, seperti MoU, merupakan dasar bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kerjasama. Bagi institusi pelaksana, kesepakatan ini merupakan sinyal maksud baik di level pengambil kebijakan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Kesepakatan ini juga memudahkan institusi pelaksana dalam proses menentukan prioritas dan dalam hal fungsi manajerial<sup>22</sup>.

- 1) Indonesia berkepentingan untuk segera memulihkan kondusifitas Bali karena berkaitan dengan devisa dan kesejahteraan rakyat<sup>23</sup>.
- 2) Secara *proximity* geografi, Australia merupakan tetangga dekat Indonesia<sup>24</sup>.
- 3) Stabilitas kawasan yang aman dan dinamis akan meningkatkan kesejahteraan bersama. Lebih lanjut Pejabat Kemkoplhukam menyebutkan, "Kita berbaik

dengan tetangga kita itu konteksnya melindungi kepentingan nasional kita, bukan melindungi kepentingan nasional Australia".<sup>25</sup>

- b. Terorisme adalah kejahatan lintas negara

Dalam menghadapi kejahatan lintas negara hampir mustahil jika suatu negara memutuskan untuk menanganinya seorang diri. Selain itu kelompok teroris ini juga memiliki kemampuan teknologi yang bagus dan aktivitas mereka semakin kompleks. Mereka juga memiliki karakter yang dinamis. Anggota Densus 88 AT mengatakan jika tidak mau terorisnya menang ya memang harus kerjasama<sup>26</sup>.

- c. *No single country immune from terrorist activities*

- d. Kerjasama resiprokal antara Indonesia dan Australia

Australia memiliki nilai lebih dari segi finansial dan teknologi, stabil, demokratik, standar Eropa, sistem hukumnya kuat, penghargaan terhadap HAM tinggi. Australia memiliki kredibilitas membangun

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>22</sup> David Connery *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>23</sup> Hasil wawancara peneliti.

<sup>24</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>25</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>26</sup> Hasil wawancara peneliti

sistem yang solid, struktur manajemen yang kuat. Indonesia juga memiliki nilai lebih di sisi lainnya seperti merupakan anggota G-20, *leader* di ASEAN, negara demokratis dan bersinergi dengan muslim yang mayoritas. Jadi saling melengkapi. Indonesia memiliki *skills*, ideologi, sistem pertahanan yang lebih baik dibanding negara lain di Asia Tenggara.

- 1) Indonesia merupakan *buffer zone* Australia.
- 2) Australia dikelilingi oleh negara-negara berkembang yang memiliki problem-problem sosial politik yang tidak stabil<sup>27</sup>
- 3) Indonesia dan Australia adalah *strategic partners*. Pejabat Kemkopolhukam menerangkan bahwa posisi Indonesia dan Australia adalah setara, bahkan strategis satu sama lain<sup>28</sup>.
- 4) Bali merupakan salah satu tujuan wisata favorit warga Australia<sup>29</sup>

- 5) Indonesia memiliki ALKI di mana para pengungsi yang berniat menuju Australia akan menggunakan Indonesia sebagai tempat persinggahan<sup>30</sup>
- 6) Menjaga perdamaian dunia adalah bagian dari konstitusi Indonesia<sup>31</sup>.
- 7) Sebelum Bom Bali I, JI sudah mendirikan cabang di Australia<sup>32</sup>
- 8) Australia sudah lebih dulu memantau pergerakan organisasi teroris di Asia Tenggara<sup>33</sup>.

### **Hasil Analisis Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia dalam Kasus Bom Bali**

#### **1. Karakter masalah**

Ada 2 hal yang disoroti dalam memahami karakter masalah Bom Bali I, penanganan korban dan penanganan kasus teror itu sendiri. Korban, baik meninggal maupun luka-luka, mayoritas merupakan warga asing<sup>34</sup>. Sepanjang proses penanganan korban memang terjadi

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>28</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>29</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>30</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>31</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>32</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>33</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>34</sup> Federal Bureau of Investigation, *op.cit.*, hlm. 11.

banyak perbedaan data jumlah korban yang diberitakan oleh media massa. Adapun di sini disajikan data resmi yang dilaporkan oleh Departemen Kesehatan RI, yakni korban meninggal sebanyak 202 jiwa dan luka-luka sebanyak 317 orang. Dengan demikian total korban adalah 519<sup>35</sup>.

**Tabel 1.** Data Korban Tewas Menurut Asal Negaranya

Asal Negara	Jumlah	Asal Negara	Jumlah
Indonesia	12	Perancis	3
Australia	88*	Korea	2
Inggris	20	Ekuador	1
Swedia	6	New Zealand	2
Jerman	6	Singapura	1
USA	7	Taiwan	1
Switzerland	4	Belanda	2
Denmark	3	Kanada	1
Jepang	2	Afrika Selatan	1
Brazilia	1		

Sumber: Bom Bali: Buku Putih tidak resmi investigasi Teror Bom Bali (2002). Hal: 110

\* Penyesuaian data termutakhir

Hal lainnya yang perlu disoroti adalah mengenai pelaku teror. Pelaku kasus Bom Bali I adalah sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi

Jama'ah Islamiyah (JI). Jika dilihat berdasarkan sejarahnya, Jama'ah Islamiyah (JI) memiliki akar pergerakan yang berkaitan dengan Darul Islam pada tahun 1940an. Anggota JI bukan hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga Malaysia, Singapura, dan Filipina. JI memiliki sejumlah kelompok pecahan. Diduga jumlah ada sekitar 1500 anggota JI yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelompok JI juga sudah berkembang di Australia selama bertahun-tahun sebelum 2002<sup>36</sup>.

Pergerakan JI juga sangat dinamis dan berkelanjutan. Proses rekrutmen anggota baru terus dilakukan. Ideologi yang mereka tanamkan juga sangat dalam sehingga proses penyidikan menjadi menantang<sup>37</sup>. Jamaah Islamiyah juga beroperasi dengan cara klandestin dan terpecah-pecah ke dalam kelompok-kelompok kecil. Sehingga mereka dapat beradaptasi dengan strategi kontra-terorisme yang dilancarkan oleh pemerintah<sup>38</sup>. Para tersangka bergerak dinamis dalam strategi serangan dan persembunyiannya. Sebagai contoh ketika mengetahui bahwa POLRI dibantu

<sup>35</sup> Departemen Kesehatan RI, *Menangani Korban Ledakan Bom di Bali*, (Jakarta, 2003), hlm. 10

<sup>36</sup> Mark Manyin *et.al.*, "Terrorism in Southeast Asia", CRS Report for Congress, Agustus 2004.

<sup>37</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>38</sup> Roel Meijer, *Counter-Terrorism Strategies in Indonesia, Algeria, and Saudi Arabia*, (Hague: Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", 2012), hlm. 30-31,

AFP menggunakan alat pelacak seluler maka mereka mengganti-ganti nomer telepon dan meminimalisir penggunaan seluler dalam berkomunikasi<sup>39</sup>.

### Struktur Implementasi Kerjasama

Sebelum menyimak detail pelaksanaan investigasi gabungan antara POLRI dan AFP, peneliti merasa perlu menyajikan asumsi atau pandangan-pandangan dasar yang sejauh hasil pengamatan peneliti merupakan hal pokok yang hendak ditekankan oleh seluruh nara sumber yang berhasil peneliti wawancarai.

#### 2. Australia berperan sebagai pendukung

Dalam pengungkapan kasus Bom Bali, Australia berperan sebagai *back up* POLRI. Jika ada informasi atau dukungan teknologi yang belum dimiliki dan dibutuhkan dalam operasi maka Australia akan membantu dalam hal itu. Adapun selama proses penyelesaian kasus, pihak AFP selalu memantau perkembangan kasus untuk dilaporkan ke pemerintah Australia<sup>40</sup>.

#### 3. Kasus Bom Bali murni diungkap oleh POLRI

Hal ini disampaikan berkali-kali oleh nara sumber. Adapun peran besar AFP sangat terasa begitu memasuki tahap pengejaran para pelaku<sup>41</sup>. Salah satu ketua tim investigasi Bom Bali I menambahkan bahwa pada saat itu, polisi asing, termasuk Australia, tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam proses olah TKP<sup>42</sup>. Setelah memahami asumsi dasar di atas, maka diharapkan pemaparan selanjutnya akan lebih mudah difahami, tanpa dikhawatirkan terjadinya salah kaprah.

Beberapa jam setelah ledakan<sup>43</sup>, *Commissioner* AFP McKeelty, menghubungi Kapolri Da'i Bachtiar sembari memantau perkembangan situasi Bom Bali bersama timnya. Dirinya menawarkan bantuan dan Da'i Bachtiar menyambut baik hal tersebut. Beberapa hari kemudian

<sup>39</sup> Ken Conboy, *Intel II Medan Tempur Kedua*, (Tangerang selatan: Pustaka Primatama 2009), hlm. 204

<sup>40</sup> Hasil wawancara peneliti.

<sup>41</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>42</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>43</sup> David Connery *et.al.*, "A Return on Investment: The Future of Police Cooperation Between Australia and Indonesia", jurnal Australian Strategic Police Institute, Maret 2014.

dirinya menemui Kapolri di Indonesia<sup>44</sup>.

Pada tanggal 17 Oktober 2002, Da'i Bachtia dan McKeelty menandatangani kesepakatan pembentukan tim investigasi gabungan secara resmi<sup>45</sup>. Tim gabungan ini bekerja dibawah kendali POLRI<sup>46</sup>. Menlu Hasan Wirajuda juga turut menegaskan bahwa pihak Indonesia tetap sebagai pemegang kendali utama dalam penanganan kasus Bom Bali<sup>47</sup>. I Made Mangku Pastika dan Graham Ashton ditunjuk sebagai komandan gabungan. *Federal Agent* Tim Morris yang bertindak selaku kepala unit kontra-terorisme Australia menegaskan bahwa investigasi ini adalah milik Indonesia dan kehadiran Australia hanya berperan untuk membantu.

Tim gabungan ini berfungsi untuk melakukan identifikasi dan pengejaran para pelaku<sup>48</sup>. Fungsi

lainnya adalah untuk mengkoordinir kontribusi aparat penegak hukum dari negara-negara lain<sup>49</sup>. Kesepakatan ini akhirnya menjadi kerangka kerja dan pengaturan komando untuk seluruh bantuan penegakan hukum oleh negara asing yang diterima Indonesia yang dikenal dengan nama *Operation Alliance*<sup>50</sup>.

Setibanya di Bali pada tanggal 13 Oktober 2002, AFP membentuk pos komando (posko) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dengan POLRI<sup>51</sup>. Di posko tersebut tergabung investigator yang bekerja di Bali, tim DVI, forensik, intelijen, media, administrasi, keamanan, IT, dan komunikasi<sup>52</sup>. Selain itu posko ini juga berfungsi untuk memberi perkembangan terkini kepada pejabat AFP yang menangani masalah kontra-terorisme<sup>53</sup>.

Dalam penanganan kasus Bom Bali dibentuk banyak sekali tim yang ukurannya kecil-kecil. Kerja tim-tim

---

<sup>44</sup> Keith Moor, "Insight editor Keith Moor reconstructs the story behind the 2002 Bali bombing", Herald sun, Oktober 2012.

<sup>45</sup> Australian Federal Police. *Countering Terrorism*, (Canberra, 2003), hlm. 2,

<sup>46</sup> David Connery *et.al.*, *loc.cit.*,

<sup>47</sup> Samsul Muarif, "Pemberitaan Media Terhadap Isu Terorisme (Analisa Wacana pada Harian Umum Republik dalam Pemberitaan Bom Bali)", *Tesis Magister*, (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Ilmu

Komunikasi, Universitas Indonesia, 2004), lampiran.

<sup>48</sup> Laporan *Australian Security Intelligence Organisation* kepada Parlemen Australia tahun 2002-2003, hlm. 14 (24)

<sup>49</sup> David Connery *et.al.*, *loc.cit.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Kamedo, *The Terror Attack on Bali, 2002*, (Swedia: 2007), hlm. 89

<sup>52</sup> Australian Federal Police, *loc.cit.*

<sup>53</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 1632 (on kindle view)

tersebut paralel atau bergerak sesuai fungsinya masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Salah satu contohnya adalah pada saat tim forensik berhasil memecahkan suatu teka-teki, tim investigasi lapangan gabungan masih terus memburu pelaku pengeboman lainnya<sup>54</sup>.

Pemaparan hasil keseluruhan investigasi kepada mitra polisi asing yang hadir tetap dilakukan oleh pihak POLRI<sup>55</sup>. Selama bergabung dengan POLRI, tim AFP seringkali memberikan berbagai usulan-usulan yang akan memberikan kemudahan dalam proses investigasi<sup>56</sup>. Selain itu tim AFP juga mendapatkan akses untuk mengolah TKP secara mandiri<sup>57</sup> dan juga melakukan introgasi selama berjam-jam kepada para tersangka<sup>58</sup>.

Per 2005, Ada 9 personil AFP yang ditempatkan secara permanen di Jakarta dan Bali, serta sekitar 25 hingga 30 personil 'di lapangan' bergantung kebutuhan operasional<sup>59</sup>. Tim pelacak gabungan ini masih terus beroperasi untuk memburu para pelaku teror di Indonesia. Pergerakan tim surveilans

yang ada di lapangan dipantau lewat ruang pelacak telepon yang ada di Bali. Fungsi ruang pelacak adalah memberikan perkembangan terkini kepada tim surveilans yang sedang menuju target<sup>60</sup>

Pada masa-masa awal investigasi, rasa saling curiga di antara POLRI dan AFP masih begitu besar. Tim POLRI yang didatangkan dari berbagai unit dan kesatuan juga memiliki pandangan yang berbeda akan kehadiran AFP. Ada tim POLRI yang mencoba 'menyedot' isi laptop pihak AFP. Tim ini juga kurang merasa setuju dengan metode survei yang AFP lakukan. Akses masuk ke TKP bukan hanya tidak diberikan kepada AFP, tetapi juga kepada tim POLRI yang dipimpin oleh Gories Mere<sup>61</sup>.

Kendatipun terjadi rasa saling curiga antara tim Indonesia dan Australia, namun kedua tim tersebut tetap bekerja bersama-sama setelah tim Australia mendapat izin masuk untuk membantu mengolah TKP. Tim forensik AFP dan POLRI bersama-

---

<sup>54</sup> Keith Moor, *loc.cit.*

<sup>55</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>56</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 1641

<sup>57</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 1979

<sup>58</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 2233

<sup>59</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 2255

<sup>60</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 2115

<sup>61</sup> Hasil wawancara peneliti

sama mempelajari apa yang terjadi saat ledakan di Paddy's Cafe<sup>62</sup>.

Bertolak belakang dari cerita di atas, David Craig yang pada tahun 2005 bertindak sebagai Kepala Tim Investigasi Australia untuk kasus kontra-terorisme mengaku bahwa rasa percaya antar personil AFP dan POLRI sangat tinggi satu sama lain ketika melakukan pengejaran kepada para pelaku di lapangan<sup>63</sup>.

Sehingga pada saat ada pihak ketiga yang mencoba memberikan sebuah informasi penting mengenai upaya pengejaran tersangka teroris, Craig merasa sangat bersalah terhadap POLRI karena untuk sementara tidak bisa berbagi informasi<sup>64</sup>.

Bukan hanya rasa saling percaya, namun juga rasa saling menghormati dan menghargai. Sebagai contoh ketika masyarakat Australia mengkritik kehadiran POLRI dalam investigasi kasus 'powder terror' di KBRI Canberra, AFP mencoba membela keberadaan mereka. Hal ini didasarkan pada rasa terima kasih AFP atas perlakuan yang sangat

bersahabat dari POLRI saat mereka pertama kali hadir di Indonesia untuk membantu penanganan kasus Bom Bali I<sup>65</sup>. Tim gabungan POLRI-AFP bisa bekerja dengan sangat solid karena adanya persahabatan, komitmen, dan loyalitas satu sama lain. Sehingga tumbuh rasa saling percaya yang kuat dalam tim tersebut<sup>66</sup>.

Rasa saling percaya merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan kerjasama, terutama kerjasama internasional. Pelaksanaan kerjasama di lapangan akan berjalan lebih lancar jika sudah terbangun rasa saling percaya. Sehingga prosedur resmi, semisal ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA), bisa disederhanakan. Pelaksana lapangan harus bersifat luwes dalam pergaulan antar sesama pelaksana<sup>67</sup>. Sikap saling memberikan manfaat atau resiprokal dan juga kemampuan membina hubungan secara personal untuk memotong birokrasi.

Kembali lagi dengan persoalan rasa saling percaya antara POLRI dan AFP pada saat penanganan kasus

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara peneliti

<sup>63</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 2233

<sup>64</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 2031

<sup>65</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 1923

<sup>66</sup> David Craig, *op.cit.*, hlm. 1181

<sup>67</sup> Hasil wawancara peneliti

Bom Bali, walaupun setelah proses investigasi selesai dan dalam proses pengejaran para tersangka digambarkan bahwa pihak POLRI dan AFP dapat bekerjasama dengan dilandasi rasa saling percaya yang besar, namun di awal-awal rasa saling curiga yang besar di antara kedua belah pihak masih sangat tinggi<sup>68</sup>.

Hal serupa juga dirasakan oleh Tim DVI Australia. Pada tanggal 15 Oktober 2002, Griffiths dan Hilton bersama beberapa personil AFP menuju TKP. Sayangnya mereka tidak mendapat akses masuk ke TKP karena dihalangi oleh personil TNI-AD. Tim tersebut kemudian bergerak menuju RSUP Sanglah dan menemui Komandan DVI Indonesia, Kolonel Eddy Saparwoko dan Odontolog forensik Indonesia senior, Letkol Peter Sahelangi. Hubungan personal yang dekat antara mereka memperlancar pelaksanaan proses DVI bersama tim Australia. Kolonel Saparwoko meminta Griffiths dan

Hilton untuk membantunya dalam mengatur proses identifikasi berdasarkan protokol DVI standar yang ditetapkan Interpol<sup>69</sup>.

Pada awal-awal semuanya memang dirasa sangat kacau. Indonesia menganggap Australia tidak memahami makna dibalik tindakan yang dilakukan oleh Indonesia. Untuk itu juru bicara POLRI, Edward Aritonang, pada tanggal 16 November 2002 lewat koran *Republika* meminta agar pihak Australia memandangi kasus Bom Bali dengan kaca mata Indonesia<sup>70</sup>.

Selanjutnya, pembahasan akan beralih pada saat proses pengejaran dan penangkapan para pelaku. Pada awal proses investigasi, baik POLRI maupun AFP tidak mau berspekulasi mengenai siapa pelaku Bom Bali<sup>71</sup>, hanya saja Graham Ashton menilai bahwa tiga ledakan yang terjadi di Bali ada kaitannya dengan pencurian 400 Kg klorat yang terjadi pada bulan September 2002 di Jawa<sup>72</sup>.

---

<sup>68</sup> Mabes POLRI & PTIK, *Buku Putih Bom Bali: Peristiwa dan Pengungkapan*, (Jakarta: PTIK Press, 2004), hlm. 255.

<sup>69</sup> Christopher Griffiths *et.al.*, "Aspects of Forensic Responses to the Bali Bombings". *ADF Health Vol. 4*, 2003, hlm. 3

<sup>70</sup> Dewi Novianti, "Wacana Media dalam Kasus Bom Bali (Pertarungan Wacana Harian

*Republika dan Harian Kompas dalam Kasus Bom Bali)*", *Tesis Magister*, (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2004), hal. 67.

<sup>71</sup> AP Archive. "Amateur video of immediate aftermath of Bali blast", Juli 2015.

<sup>72</sup> BBC News. "Bali Bombings", Oktober 2002.

Penangkapan pertama kali dilakukan pada tanggal 5 November 2002 terhadap Amrozi bertempat di kediamannya di Tenggulun, Jawa Timur. Penangkapan ini berhasil dilakukan setelah menelusuri jejak kepemilikan L-300 yang digunakan sebagai bom mobil<sup>73</sup>. Bersamaan itu juga 51 kasus bom yang terjadi sebelumnya juga berhasil diselesaikan<sup>74</sup>. Selain itu, enam tersangka Bom Bali lainnya yang berhasil diidentifikasi berdasarkan keterangan Amrozi adalah Dulmatin, Imam Samudera, Ali Imran, Idris, Abdul Ghani, dan Umar Kecil. Enam orang ini hanyalah mereka yang terlibat langsung dalam peledakan, sedangkan masih ada 11 orang lainnya yang diduga terlibat langsung dalam perencanaan dan perakitan Bom Bali. selain itu masih ada puluhan lainnya yang berperan kecil, termasuk menyembunyikan buronan<sup>75</sup>.

Pada tanggal 19 November 2002, polisi berhasil menangkap Abdul Rauf<sup>76</sup>. Sejumlah keterangan dari Abdul Rauf telah membantu

polisi melacak keberadaan Imam Samudera. Pada tanggal 21 November 2002, polisi berhasil menangkap Imam Samudera. Pada saat ditangkap dirinya membawa sebuah paspor palsu dan sebuah laptop. Berdasarkan pemeriksaan pakar IT Australia yang memeriksa laptop Imam Samudera, laptop tersebut memuat sejumlah foto porno wanita barat, foto Abu bakar Ba'asyir, dan foto-foto korban Bom Bali. Selain itu diketahui pula bahwa Imam Samudera sempat mengunggah sebuah pernyataan di internet yang menyebutkan tentang keberhasilan serangan Bali<sup>77</sup>. Sementara itu Pada tanggal 4 Desember 2002, Ali Ghufron alias Mukhlas ditangkap<sup>78</sup>.

Pada tanggal 13 Januari 2003<sup>79</sup>, Ali Imron tertangkap di sebuah pulau tak berpenghuni di kawasan Berukang, Kalimantan Timur. Adapun laporan AFP menyebutkan Ali Imron ditangkap pada tanggal 12 Januari

---

<sup>73</sup> Keith Moor, *loc.cit.*

<sup>74</sup> Kamedo, *op.cit.*, hlm. 89.

<sup>75</sup> Keith Moor, *loc.cit.*

<sup>76</sup> Keith Moor, *loc.cit.*

<sup>77</sup> Williams M. Wise, *Indonesia's War on Terror*. (Washington D.C: USINDO, 2005), hlm. 14

<sup>78</sup> Australian Federal Police, *Laporan Tahunan 2002-2003*, (Canberra: 2003), hlm. 30-31 (18)

<sup>79</sup> Keith Moor, *loc.cit.*

2003<sup>80</sup>. Pada tanggal 15 Januari 2015 semua tersangka yang tertangkap di Kaltim di bawa ke Bali. Mereka adalah Ali Imron alias Mohammad Toha, Mubarak alias Hutomo Pamungkas, Firmansyah, Mujarod, Eko Hadi, Mustakim, Sofyan Hadi alias Bejo, Hamzah Baya alias Saleh, Samsul Arifin alias Ilham, Muhammad Yunus, Hartono alias Putyanto alias Pak De, Imam Susanto alias Eko Suparman, Marzuki, Abdullah Salam, dan Sukastopo bin Karto Mihadjo<sup>81</sup>.

Penangkapan ini rupanya menjadi titik terang bagi proses investigasi. Menurut keterangan Morris, di antara sekian rumah yang berhasil diidentifikasi pernah digunakan oleh para pelaku, belum ditemukan rumah yang benar-benar digunakan untuk merakit bom tersebut<sup>82</sup>.

**Tabel 2.** Perkembangan Hasil Penangkapan Para Tersangka Teroris di Indonesia

Periode	Jumlah akumulasi penangkapan
Januari 2003	35
April 2003	29
Juni 2003	34
Juli 2003	83
Januari 2005	200

Sumber: diolah dari berbagai sumber

<sup>80</sup> Australian Federal Police, *loc.cit.*

<sup>81</sup> Mabes POLRI & PTIK, *op.cit.*, hlm. 196

<sup>82</sup> Keith Moor, *loc.cit.*

Sebenarnya masih banyak lagi penyergapan dan penangkapan yang dilakukan, namun peneliti di sini hanya menyebutkan beberapa saja yang tercatat secara tertulis dan benar-benar dapat menunjukkan kehadiran Australia dalam bagian tersebut. Tersangka Bom Bali I yang terakhir kali tertangkap adalah Umar Patek. Dirinya berhasil ditangkap di Pakistan<sup>83</sup>.

### **Pembahasan Latar Belakang Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia dalam Kasus Bom Bali I**

Axelrod menyatakan bahwa pemasalahan dasar yang ingin dijelaskan oleh teori kerjasama adalah keuntungan apa yang akan diperoleh seorang aktor dalam jangka pendek dan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh sebuah kelompok dalam jangka waktu lama. Sebagaimana yang disajikan pada hasil penelitian, terlihat dengan sangat jelas bahwa ada banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh kedua negara. Tentu saja keputusan untuk bekerjasama dalam penanganan Bom Bali, baik dari pihak Indonesia maupun Australia, merupakan keputusan yang tidak mudah. Kendati

<sup>83</sup> TvOne. "Video Penangkapan Umar Patek di Pakistan", dalam Bogor Ghost Crew, Maret 2011.

demikian, kedua negara dalam hal ini sedang berada dalam posisi yang sama-sama terdesak. Bagi Australia sendiri, ada tekanan domestik yang kuat akibat banyaknya warga negara Australia yang menjadi korban. Hal ini menjadi pertimbangan strategis bagi Australia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Kemudian perlu diketahui pula bahwa terorisme adalah kejahatan lintas negara. Kombinasi antara fakta adanya jaringan internasional dalam serangan Bom Bali I dan desakan internasional, terutama dari AS, merupakan alasan terkuat untuk bekerjasama dari sisi Indonesia.

Untuk menganalisa detail proses pengambilan keputusan untuk bekerjasama oleh Australia dan Indonesia, peneliti akan menggunakan konsep *Prisoner's Dilemma*. Seperti yang telah peneliti sebutkan pada paragraf sebelumnya, dalam Kasus Bom Bali jelas-jelas bahwa peluang keuntungan keputusan untuk bekerjasama jauh lebih besar ketimbang peluang kerugian jika ternyata dikemudian hari salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan.

Dari 4 kemungkinan modifikasi konsep *Prisoner's Dilemma* yang

ditawarkan oleh Axelrod, maka kondisi yang paling cocok untuk menggambarkan posisi Indonesia dan Australia pada saat itu adalah standar iterasi *Prisoner's Dilemma*. Dimana disebutkan dalam posisi tersebut Indonesia dan Australia merupakan aktor independen yang memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang sama. Keberlangsungan kerjasama penanganan Kasus Bom Bali ditentukan oleh perkembangan tindakan Indonesia terhadap Australia ataupun sebaliknya.

Pelaksanaan Kerjasama penanganan kasus Bom Bali I antara Indonesia dan Australia Bersifat Legal, Indiskriminasi, dan Independen. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia selalu mempertimbangkan respon Australia dalam mengevaluasi keberlangsungan kerjasama tersebut. Indonesia segera mengevaluasi jalannya kerjasama begitu terlihat indikasi bahwa Australia mulai mengabaikan prinsip independensi Indonesia dalam penanganan kasus terorisme. Begitu pula dengan Australia, khususnya masalah pendanaan. Terlihat bahwa ketika Indonesia dinilai mampu dalam mengembangkan kapasitas kontra-terorisemenya maka Australia melipatgandakan nilai bantuannya.

Lebih lanjut Axelrod menekankan akan analisa faktor ikatan (rasa saling percaya) dan jaringan komunikasi. Kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia sudah berlangsung cukup lama sebelum Bom Bali I terjadi. Dari situ dapat dilihat bahwa jalinan komunikasi dan tingkat kepercayaan antara Indonesia dan Australia di bidang kerjasama keamanan (kepolisian) bisa dikatakan cukup bagus. Hal ini terlihat dari walaupun adanya sejumlah ketegangan politik secara bilateral, namun hubungan kepolisian 2 negara tetap dapat dilanjutkan.

Tentunya hal ini adalah fakta yang menarik. Rupanya urgensi kasus-kasus kriminal yang melibatkan dua negara (kejahatan lintas negara) dapat menutupi ketegangan politik yang ada. Jika kita kembali pada konsep *Prisoner's Dilemma*, tentunya sekali lagi hal ini membuktikan bahwa posisi di mana peluang untuk mengambil manfaat hampir selalu hadir dalam kerjasama keamanan.

Masih berdasarkan fakta bahwa banyaknya kerjasama yang dilakukan antara kepolisian Indonesia dan Australia sebelum Bom Bali secara langsung maupun tidak langsung telah membuat jaringan komunikasi yang unik sehingga memungkinkan adanya kerjasama di

masa depan. Hal ini terbukti pada saat insiden Bom Bali terjadi, pucuk pimpinan kepolisian antara dua negara dengan mudahnya langsung berkomunikasi secara personal. Lebih lanjut dapat dilihat bahwa sejak awal Australia memang menaruh kepentingan besar dalam pengembangan kapasitas POLRI pasca reformasi. Hal ini dapat diperhatikan melalui langkah-langkah strategis yang dilakukan Australia dalam pengembangan kapasitas POLRI.

Selanjutnya peneliti akan menganalisa keputusan melakukan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus Bom Bali. Tentunya menjadi menarik untuk diketahui mengapa Australia dan Indonesia memilih juga menggunakan strategi kerjasama bilateral disamping juga kerjasama multilateral dalam penanganan kasus Bom Bali. Dijelaskan oleh Simma (1994) bahwa salah satu senjata bilateralisme adalah desainnya yang melindungi kepentingan internal negara para pihak dan hubungan luar negeri negara tersebut dari intervensi negara lain.

Sebelum tahun 2002, diketahui bahwa di kawasan Asia Tenggara pada saat itu belum ada kerangka kerja formal yang memungkinkan pelaksanaan

berbagai strategi kontra-terorisme yang efektif. Pendekatan bilateral ini terbukti memang sangat efektif dalam penanganan kasus Bom Bali. Kerangka bilateral telah memungkinkan percepatan pengambilan keputusan para petugas pelaksana. Sebenarnya strategi bilateral ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus Bom Bali. Kedua negara tersebut juga melakukan strategi multilateral, misalnya melalui *Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*. Bisa dikatakan kedua negara, khususnya Australia, menempuh segala cara untuk memerangi terorisme.

### **Pembahasan Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia dalam Kasus Bom Bali**

Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus Bom Bali menciptakan satu kombinasi strategi yang terbukti efektif. Australia dengan segala sumber daya yang dimilikinya dan Indonesia dengan ketekunan dan kesungguhannya (tentunya juga dengan ide-ide kreatif dari para personilnya). Indonesia memiliki gayanya sendiri dalam

menangani kasus Bom Bali, termasuk pendekatan persuasifnya.

Indonesia juga melaksanakan operasi tersembunyi dan penetrasi langsung ke sarang teroris. Sebuah strategi kontra-terorisme yang juga disebutkan oleh Benjamin (2008).

Secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan-kebijakan kontra-terorisme yang diambil selama penanganan kasus Bom Bali ditentukan sepenuhnya oleh Indonesia. Adapun Australia tetap dalam posisinya sebagai pendukung.

Kebijakan penggunaan teknologi-teknologi terkini memang sangat tepat dalam penanganan kasus Bom Bali. Adapun kelemahan-kelemahan dari sisi peraturan dan perangkat hukum tidak bisa diganggu gugat oleh pihak Australia. Kendati demikian, bantuan yang bisa dilakukan Australia adalah dalam bentuk dorongan, seperti pelatihan dan pendampingan legislasi.

Selanjutnya, juga akan dilihat efektifitas kerjasama tersebut. Satu hal yang ingin peneliti tekankan dalam hal ini adalah bahwa sulit untuk mengukur efektifitas kerjasama kontra-terorisme Indonesia dan Australia dalam kasus Bom Bali ini, terutama dalam proses hukum para pelaku. Efektivitas yang mungkin

sangat bisa terukur adalah dalam hal penanganan korban. Para korban jiwa hampir keseluruhannya dapat diidentifikasi dan korban selamat dapat ditangani. Tentunya dengan dinamika proses yang cukup rumit. Poin pentingnya adalah terselenggaranya proses DVI sesuai standar internasional Interpol.

Adapun mengenai evaluasi penanganan kasus terornya sendiri, peneliti akan mengutip pendapat Spencer (2006). Beliau menuliskan bahwa evaluasi terhadap efektivitas kontra-terorisme banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional yang menekankan pada jumlah serangan yang dapat dikurangi, para pemimpin teroris yang dapat ditangkap, seberapa banyak teroris yang dapat dibunuh, atau berapa jumlah uang dari kegiatan terorisme yang dapat dibekukan, dan juga penurunan rasa cemas terhadap ancaman terorisme.

Jika dilihat dari jumlah serangan yang dapat dikurangi maka bisa dibilang kerjasama ini tidak begitu efektif. Faktanya sepanjang 2002 hingga 2009, berbagai serangan bom yang melibatkan pelaku-pelaku yang sama dengan pelaku Bom Bali terus bermunculan. Alasan mengapa hal ini bisa terjadi karena karakter permasalahannya memanglah

rumit. Selain itu masalahnya karena tim ahli pembuat bom Ji, yakni Dr. Azahari dan Noordin M. Top tidak bisa segera tertangkap. Alasan mengapa mereka belum bisa tertangkap juga cukup rumit dan peneliti rasa kurang relevan untuk dibahas di sini.

Kendati demikian, peneliti bisa katakan secara keseluruhan kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia berjalan dengan sangat efektif, namun membutuhkan waktu hingga hampir 10 tahun untuk bisa dikatakan efektif jika dilihat dari kategori ini.

Adapun jika dilihat dari jumlah para pemimpin teroris yang dapat ditangkap atau seberapa banyak teroris yang dapat dibunuh maka kerjasama Indonesia-Australia tersebut bisa dikategorikan sangat efektif. Terbukti dengan tertangkap dan diadilinya seluruh pelaku inti Bom Bali, walaupun ternyata memang 'pelaku' paling berbahaya, yakni Dr. Azahari, baru bisa diatasi pada tahun 2005.

Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah derajat integrasi antar institusi pelaksana. Sabtier dan Mazmanian menyebutkan setidaknya ada 2 faktor penentu derajat integrasi antar institusi pelaksana, yakni ada tidaknya hak veto yang diberikan terhadap

sejumlah pihak dan ada tidaknya sanksi dan stimulan yang tepat untuk meyakinkan semua pihak untuk melaksanakan kebijakan awal.

Dalam kasus ini, kedua unsur tersebut tidak ditemui. Alasannya karena kerjasama ini hanya didasarkan pada MoU yang secara hukum tidak mengikat. Sesungguhnya peneliti sudah berusaha mendapatkan salinan MoU mengenai pembentukan tim investigasi dan intelijen gabungan antara Indonesia dan Australia sesaat setelah Bom Bali, namun sayangnya peneliti tidak berhasil mendapatkan salinan MoU tersebut.

Peneliti sudah mengajukan permohonan kepada Kemlu, Hubinter-POLRI, Bagian Politik Kedutaan Australia, dan Kantor AFP Jakarta. Semua jawabannya sama, yakni menyatakan bahwa salinan MoU tersebut tidak tersedia untuk publik. Dengan demikian, peneliti belum berkesempatan untuk menilai secara mendetil apakah ada bagian khusus dalam lembar kerjasama tersebut yang bersifat mengikat.

Beranjak dari sesuatu yang memang tidak tersedia untuk dianalisa, baiknya kita melihat kepada sisi lain yang menjadi faktor penentu derajat integrasi, yakni masalah koordinasi, tingkat integrasi secara hierarki, dan Perbedaan tingkat

komitmen pelaksanaan oleh masing-masing institusi. Dinilai dari sisi koordinasi maka implementasi kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia dalam kasus Bom Bali ini cukup baik. Kekacauan hanya nampak terjadi di awal-awal pasca ledakan. Namun untuk skala insiden sekelas Bom Bali yang melibatkan koordinasi lintas negara, koordinasi awal yang dilakukan baik oleh Indonesia maupun Australia terkategori cukup baik.

Dari sisi Australia, walaupun koordinasi yang dilaksanakan tidak seratus persen sesuai rencana, setidaknya mereka sudah memiliki respon tanggap darurat yang sudah dirancang pasca 9/11. Dari sisi Indonesia, peneliti ingin sedikit menyoroti peran penting seorang tokoh yang mungkin dalam sejumlah buku mengenai Bom Bali tidak dibahas banyak, yakni Prof. Hermawan Sulistiyo. Peneliti tidak ingin terlalu membesar-besarkan peranan beliau, namun ada peranan strategis dan unik yang beliau mainkan dalam mengarahkan koordinasi POLRI saat respon pertama Bom Bali. Selaku konsultan POLRI yang sudah sejak awal mempelajari seluk-beluk institusi tersebut. Beliau adalah orang yang berada di belakang pernyataan Kapolda Bali Budi Setiawan bahwa kasus Bom Bali akan diungkap dalam waktu

satu bulan. Selain itu beliau juga yang meminta untuk didatangkannya Rusbagio Ishak dan membentuk tim investigasi awal. Lebih lanjut beliau juga segera membantu penyediaan dana awal. Seperti yang semua orang tahu bahwa ketersediaan dana merupakan unsur vital dalam pelaksanaan segala macam aktivitas. Hal terakhir yang bisa peneliti soroti adalah kemampuan lobi beliau terhadap Stig Edgvist yang saat itu ditunjuk sebagai kepala tim gabungan kepolisian Eropa untuk negara-negara yang warganya menjadi korban. Beliau mampu meyakinkan Edgvist untuk menyuarakan ke dunia internasional bahwa kapasitas Indonesia untuk penanganan Bom Bali tidak perlu diragukan. Selebihnya beliau berperan penting sebagai konsultan POLRI saat itu yang mana artinya sebagai tempat POLRI mencari pertimbangan untuk mengambil kebijakan.

Dalam koordinasi lebih luas yakni antara Indonesia dan Australia, lebih banyak dimudahkan karena kedekatan personal tokoh-tokoh penting antar dua negara. Kendati demikian dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat dua kelompok respon terhadap kehadiran

Australia, yakni percaya sepenuhnya dan setengah percaya (menaruh curiga). Walaupun rupanya hal ini bisa diatasi oleh koordinasi yang sangat bagus antara pimpinan dua institusi tersebut. Perhatikan bagaimana AFP tetap bisa bekerja dan mengakses segala sumberdaya yang tersedia. Peneliti sendiri sengaja sedapat mungkin mewawancarai tokoh yang dapat mewakili dua kelompok respon tersebut. Terbukti dalam mengutarakan pandangan-pandangannya, kelompok respon yang tidak sepenuhnya dekat dengan pihak Australia menaruh catatan-catatan khusus atas kehadiran Australia dalam penanganan kasus Bom Bali.

### **Pembahasan Refleksi Pengalaman Kerjasama Penanganan Kasus Bom Bali Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia**

Diplomasi pertahanan dapat difahami sebagai bentuk kerjasama masa damai dengan menggunakan angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait (utamanya kementerian pertahanan) sebagai alat kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan<sup>84</sup>. Ada 3 komponen utama diplomasi pertahanan, yakni

---

<sup>84</sup> Andrew Cotty and Anthony Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles For Military*

*Cooperation and Assistance* (Oxon: IISS, 2004), hlm 5

*confidence building measures (CBMs)*, pembangunan kapastas pertahanan, dan pembangunan industri pertahanan<sup>85</sup>. Adapun kerjasama kontra-terorisme dalam penanganan kasus Bom Bali I antara Indonesia dan Australia melalui sudut pandang diplomasi pertahanan dapat kita refleksikan lebih lanjut melalui bahasan *confidence building measures (CBMs)*.

Seperti yang sudah panjang lebar dibahas di bagian terdahulu, sangat jelas menonjolkan peran Polri dan AFP. Padahal dalam kajian diplomasi pertahanan, aktor utama yang seharusnya menjadi sorotan adalah angkatan bersenjata dan kementerian pertahanan. Perlu peneliti ungkapkan bahwa pada saat kejadian Bom Bali I, hubungan militer antara Australia dan Indonesia sedang mengalami kerenggangan pasca intervensi Timor-Timur.

Awalnya Australia melirik ke arah Kopassus yang dinilai sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kapasitas kontra-terorisme dan respon

cepat tanggap jika terjadi bencana sekelas Bom Bali yang mungkin akan menimpa warga Australia di Indonesia. Pada akhirnya, Australia menyadari bahwa hal ini akan menghambat upaya reformasi birokrasi Indonesia mengingat unit ini di mata internasional diduga terlibat banyak sekali kasus pelanggaran HAM<sup>86</sup>. Oleh karena itu Australia mengarahkan fokusnya pada POLRI.

Di sini tampak jelas bahwa ada pertimbangan-pertimbangan khusus mengapa pada saat kejadian Bom Bali I, komponen yang menonjol adalah kepolisian. Adapun setelah kejadian tersebut, kedua negara mulai menyadari betapa luasnya spektrum ancaman terorisme. Sehingga merasa perlu untuk melibatkan kerjasama pertahanan juga. Hal ini tentunya telah dirintis dengan adanya Traktat Lombok tahun 2006.

Permasalahannya adalah karakteristik (*nature*) dari kerjasama keamanan yang dilakoni oleh kepolisian dengan kerjasama pertahanan yang dilakoni oleh angkatan bersenjata memiliki titik kritis yang berbeda. Salah

---

<sup>85</sup> Budi Hartono, "Telaah Mengenai Diplomasi Pertahanan: Perkembangan dan Varian", dalam [https://www.academia.edu/8260395/Telaah\\_Mengenai\\_Diplomasi\\_Pertahanan\\_Perkembangan\\_dan\\_Varian?auto=download](https://www.academia.edu/8260395/Telaah_Mengenai_Diplomasi_Pertahanan_Perkembangan_dan_Varian?auto=download)

<sup>86</sup> Stephen Sherlock, "The Bali Bombing: What it means for Indonesia", Current Issues Brief No. 4 2002-03 oleh Departemen Perpustakaan Parlemen Australia, 2002, hlm. 12

satu fungsi utama angkatan bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan. Adapun kedaulatan itu sendiri kental dengan persepsi wilayah, yurisdiksi, dan teritori yang sensitif terhadap kehadiran pihak asing.

Lantas bagaimana kita merefleksikan ‘keberhasilan’ kerjasama penanganan Bom Bali I antara Indonesia – Australia dalam bentuk diplomasi pertahanan, khususnya dalam hal *confidence building measure*. Hal mendasar yang peneliti ingin sampaikan bahwa saat ini hampir seluruh negara sepakat bahwa ancaman terorisme yang bersifat internasional tidak akan mampu ditangani oleh satu negara tanpa bekerjasama dengan negara lain. Kondisi tersebut cukup menjadi pijakan yang kuat untuk membangun CBMs dalam hal kontra-terorisme.

Selanjutnya ada baiknya untuk memahami apa itu CBMs. CBMs adalah serangkaian aksi yang dibicarakan, disepakati, dan diimplementasikan secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka membangun rasa saling percaya, tanpa secara khusus

berfokus pada akar permasalahan konflik<sup>87</sup>.

Rasa saling percaya adalah syarat mutlak terjadinya sebuah kerjasama. Jika diperhatikan dengan seksama sejarah hubungan kerjasama militer antara Australia dan Indonesia memang sedikit sensitif. Terbukti ketika hubungan bilateral Indonesia-Australia merenggang pasca intervensi Timor-Timur maka hubungan komunikasi militer kedua negara ikut merenggang. Di lain pihak, kerjasama kepolisian tetap berlanjut, walaupun intensitas aktivitas kerjasama diturunkan. Sensitifitas yang tinggi ini kembali terbukti pada saat insiden penyadapan kepala negara dan insiden ‘Pancasila’. Kerjasama pertahanan kedua negara segera dibekukan untuk sementara, sedangkan imbasnya terhadap kerjasama kepolisian tidak terlalu signifikan.

Respon yang sangat sensitif ini dijelaskan oleh Mason dan Siegfried sebagai bentuk kurangnya rasa percaya antar aktor yang terlibat sehingga menyebabkan rendahnya aktivitas komunikasi, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali. Rasa kepercayaan ini harus

---

<sup>87</sup> Simon J.A Mason and Mathias Siegfried, “Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes, *Managing Peace Processes*:

*Process related questions. A handbook for AU practitioners*, Volume 1, African Union and the Centre for Humanitarian Dialogue, 2013, hlm. 58

dibangun untuk menurunkan atau meniadakan konflik. Di sinilah peran penting dari CBMs.

Adanya CBMs diharapkan dapat meningkatkan kemitraan, penghormatan kepada HAM, dan berbagai sinyal positif lainnya. Tujuan dari CBMs adalah untuk membuat semua pihak yang terlibat menyukai satu sama lain atau setidaknya terbuka untuk mengatasi akar masalah yang dihadapi secara bersama-sama<sup>88</sup>.

Dalam implementasi kerjasama kontra-terorisme Indonesia dan Australia dalam kasus Bom Bali I, terlihat bahwa pada mulanya rasa saling percaya di kedua belah pihak belum terlalu tinggi. Hal ini kemudian dapat diatasi karena kedekatan personal dan komunikasi intensif pada tataran pimpinan. Rasa saling percaya kemudian semakin meningkat seiring waktu dengan pembuktian dari kedua belah pihak bahwa tidak ada kecenderungan untuk melakukan 'kecurangan'.

Proses ini dapat direfleksikan dalam proses CBMs kerjasama pertahanan kedua negara. Jika kita bandingkan proses evolusi kerjasama keamanan dengan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia secara runut,

maka kita dapat temukan bahwa rasa saling percaya ini seringkali prosesnya harus tersendat karena adanya insiden yang menurunkan kepercayaan terhadap niat baik dari kedua belah pihak dalam membangun kerjasama.

Peneliti memandang hal tersebut dikarenakan karena objek kerjasama dalam bidang pertahanan yang terkadang memiliki derajat urgensi berbeda-beda di masing-masing pihak. Berbeda dengan kerjasama kontra-terorisme yang cenderung mengandung unsur *common enemy* bagi kedua belah pihak maka derajat urgensinya menjadi seimbang atau hampir seimbang. Oleh karena itu strategi CBMs melalui kerjasama kontra-terorisme dalam skop pertahanan memiliki peluang sukses yang cukup besar.

Dalam konsep militer klasik, fokus CBMs adalah untuk menghindari peningkatan ketegangan yang dipicu oleh salah persepsi terhadap sinyal-sinyal tertentu. Dalam suasana permusuhan yang kental, sikap dari salah satu pihak seringkali diartikan sebagai aksi permusuhan ketimbang dianggap sebagai sebuah *deterrent*. Oleh karena itu CBMs bertujuan mengklarifikasi

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Hal. 57

perbedaan antara tindakan agresif disengaja dengan riak-riak aktivitas militer yang normal. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi langsung jarak jauh, pertukaran peta militer, program latihan gabungan, informasi mengenai pergerakan pasukan, pertukaran personil militer, membangun zona bebas militer, penurunan ketegangan di perbatasan melalui patroli gabungan, ataupun zona dilarang terbang<sup>89</sup>.

Melihat dari uraian paragraf di atas dan bercermin pada keberhasilan kerjasama kontra-terorisme Bom Bali maka Indonesia dan Australia dapat menguatkan CBMs melalui kerjasama kontra-terorisme bidang pertahanan. Strategi pengembangan CBMs yang hendak peneliti sampaikan adalah menjadikan sub-kerjasama kontra-terorisme sebagai model utama. Hal ini mengingat peluang munculnya ketegangan (*dispute*) di antara kedua pihak relatif lebih kecil ketimbang sub-kerjasama pertahanan lainnya.

Kendati demikian, peneliti tidak menyarankan untuk mengikuti pola dinamika implementasi kerjasama kontra-terorisme Indonesia dan Australia pada

kasus Bom Bali I secara penuh sebelum dilakukan kajian yang lebih dalam dengan memperhatikan karakter (*nature*) angkatan bersenjata di kedua negara. Setidaknya pada bahasan kali ini didapatkan bagaimana dasar merancang pola implementasi kerjasama kontra-terorisme untuk Indonesia dan Australia secara spesifik. Peneliti berpendapat demikian mengingat implementasi kerjasama tersebut dalam kasus Bom Bali termasuk dalam kategori sukses dalam kapasitasnya sebagai bentuk kerjasama internasional.

Berikut merupakan sejumlah tantangan dalam membangun CBMs<sup>90</sup> dan bagaimana menggunakan dalam merancang strategi penguatan CBMs melalui kerjasama kontra-terorisme pertahanan:

1. Adanya keengganan para pihak untuk memulai CBMs ketika rendahnya rasa saling percaya. Ketika ada ketegangan politik antara kedua negara, diusahakan tim khusus kontra-terorisme kedua negara tetap berkomunikasi. Biarkan tim ini fokus dengan misinya melemahkan pergerakan teror

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 72

- tanpa terganggu oleh ketegangan politik yang ada. Tentunya perlu dipertimbangkan dengan sangat cermat dan teliti dalam hal penunjukan personil tim dan institusi superior pengendalinya. Pastikan semua pihak mampu bersifat netral dan dapat dipercaya.
2. Seringkali CBMs disalahgunakan oleh pihak tertentu sebagai upaya kamufase. Sistem kontrol sangat diperlukan di titik ini. Standar prosedur operasional harus dibangun sejak awal, sehingga jika ada gelagat 'kecurangan' dari salah satu pihak dapat dideteksi sejak dini. Jika ada pelanggaran, maka kedepankan komunikasi, utamanya komunikasi antar pimpinan untuk kemudian pimpinan masing-masing tim berkomunikasi ke bawahannya. Hal ini yang terbukti berhasil meredam efek kehilangan kepercayaan pada saat terjadi insiden pihak Australia mendahului Indonesia dalam pengungkapan identitas tersangka teroris yang baru saja tertangkap.
  3. Terkadang CBMs yang terlalu sukses malah menghambat untuk melakukan negosiasi yang sesungguhnya dalam rangka menyelesaikan akar permasalahan. Perlu ditekankan bahwa CBMs yang sedang dikembangkan meski memang menjadikan kerjasama kontra-terorisme sebagai model utama, namun sesungguhnya diharapkan dapat meningkatkan rasa saling percaya secara holistik antar tubuh pertahanan di kedua belah negara. Oleh karena itu, secara bertahap wacana-wacana CBMs dengan menonjolkan keberhasilan kerjasama kontra-terorisme pertahanan sebagai contoh harus diarahkan kepada CBMs dalam seluruh dimensi pertahanan.

### **Kesimpulan      Rekomendasi      dan Pembatasan**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka disimpulkan 2 hal penting. *Pertama*, pertimbangan strategis yang melatarbelakangi kerjasama kontra-terorisme antara Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus Bom Bali yakni: dari sisi Australia adalah karena banyaknya jumlah korban yang

merupakan warga negara Australia; dan adapun dari sisi Indonesia adalah karena Indonesia berkepentingan untuk menyelamatkan reputasinya di mata dunia sebagai negara yang aman. Kedua, proses implementasi kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia dalam kasus Bom Bali dapat dikatakan sukses jika dinilai menggunakan indikator jumlah pelaku teror yang tertangkap, namun dapat juga dikatakan kurang sukses jika dinilai menggunakan indikator penurunan atau penghentian jumlah serangan teror.

Berpijak dari pengalaman sukses melaksanakan kerjasama internasional kontra-terorisme dalam penanganan kasus Bom Bali I, maka Australia dan Indonesia dapat merefleksikan hal tersebut untuk merancang CBMs di bidang pertahanan dengan pendekatan yang hampir sama, namun tentunya perlu disesuaikan dengan karakter (*nature*) komponen pertahanan masing-masing negara.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Australian Federal Police. 2003. *Submission No 62: Inquiry into Australia's Relations with Indonesia*, Canberra: Australian Federal Police.
- Australian Federal Police. 2003. *Countering Terrorism*. Canberra: Australian Federal Police.
- Australian Federal Police. 2003. *Laporan Tahunan 2002-2003*. Canberra: Australian Federal Police.
- Australian Security Intelligence Organisation. 2003. *Laporan Australian Security Intelligence Organisation kepada Parlemen Australia tahun 2002-2003*. Canberra: Australian Security Intelligence Organisation.
- Conboy, Ken. 2009. *Intel II Medan Tempur Kedua*. Tangerang Selatan: Pustaka Primatama.
- Cotty, Andrew and Forster, Anthony. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxon: IISS.
- Craig, David. 2017. *Defeating Terror: Behind the Hunt for the Bali Bombers*. Richmond: Hardie Grants Books.
- Departemen Kesehatan RI. 2003. *Menangani Korban Ledakan Bom di Bali*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Federal Bureau of Investigation. 2005. *Terrorism 2002-2005*. Washington: Federal Bureau of Investigation
- Kamedo. 2007. *The Terror Attack on Bali, 2002*. Swedia: The Committee for Disaster Medicine Studies.
- Mabes POLRI & PTIK. 2004. *Buku Putih Bom Bali: Peristiwa dan Pengungkapan*. Jakarta: PTIK Press.
- Manyin, Mark et. al. 2004. "Terrorism in Southeast Asia", Canberra: CRS Report for congress
- Meijer, Roel. 2012. *Counter-Terrorism Strategies in Indonesia, Algeria, and Saudi Arabia*. Hague: Netherlands Institute of International Relations "Clingendael".

Sherlock, Stephen. 2002. *The Bali Bombing: What it means for Indonesia*, Canberra: Departemen Perpustakaan Parlemen Australia.

Sulistiyo, Hermawan (Ed). 2002. Bom Bali: Buku Putih Tidak Resmi Investigasi Teror Bom Bali. Jakarta: Pensil-324.

Wise, Williams M. 2005. *Indonesia's War on Terror*. Washington D.C: USINDO.

### Jurnal

Acharya, Arabinda. Tanpa tahun. "The Bali Bombings: Impact on Indonesia and Southeast Asia". *Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper Series II (Islamism in Southeast Asia)*, No. 2. by Hudson Institute.

Connery, David *et.al.*. 2014. "Partners Against Crime: A Short history of the AFP-POLRI Relationship", jurnal Australian Strategic Police Institute, Maret.

Connery, David *et. al.* 2014. "A Return on Investment: The Future of Police Cooperation Between Australia and Indonesia", jurnal Australian Strategic Police Institute, Maret.

Griffiths, Christopher *et. al.* 2003. "Aspects of Forensic Responses to the Bali Bombings". *ADF Health Vol.* 4.

Mason, Simon J.A and Siegfried, Mathias. 2013. "Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes, *Managing Peace Processes: Process related questions. A handbook for AU practitioners*, Volume 1, African Union and the Centre for Humanitarian Dialogue.

### Tesis

Muarif, Samsul. 2004. "Pemberitaan Media Terhadap Isu Terorisme (Analisa Wacana pada Harian

Umum Republika dalam Pemberitaan Bom Bali)", *Tesis Magister*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.

Novianti, Dewi. 2004. "Wacana Media dalam Kasus Bom Bali (Pertarungan Wacana Harian Republika dan Harian Kompas dalam Kasus Bom Bali)", *Tesis Magister*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.

### Berita

AP Archive. "Amateur video of immediate aftermath of Bali blast", Juli 2015.

BBC News. "Bali Bombings", 15 Oktober 2002

Moor, Keith. "Insight editor Keith Moor reconstructs the story behind the 2002 Bali bombing", Herald sun, Oktober 2012.

TvOne. "Watch "Video Penangkapan Umar Patek di Pakistan", dalam Bogor Ghost Crew, Maret 2011.

### Internet

Hrtono, Budi. "Telaah Mengenai Diplomasi Pertahanan: Perkembangan dan Varian", dalam [https://www.academia.edu/8260395/Telaah\\_Mengenai\\_Diplomasi\\_Pertahanan\\_Perkembangan\\_dan\\_Varian?auto=download](https://www.academia.edu/8260395/Telaah_Mengenai_Diplomasi_Pertahanan_Perkembangan_dan_Varian?auto=download), diakses tanggal 25 September 2019.

